

Nama : Zakki Mahlufi

NPM : 2413053180

Kelas : 2F

Prodi : PGSD

Setelah melihat video tersebut, analisis yang dapat saya terima adalah

SUPREMASI HUKUM

Dalam berbagai situasi khususnya di Indonesia, hukum diartikan sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk mengatur dan menjaga hubungan antara negara dan masyarakat. Apabila masyarakat di Indonesia hidup secara sederhana dan sistem kehidupan ini mampu bertahan secara turun-temurun hingga ratusan tahun dan diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern akan hidup dengan begitu kompleks, rukun, tentram, dan tidak akan lagi menyerahkan segala sesuatu yang dimiliki kepada *customary law/interactional law*.

Saat ini hukum sudah menjadi patokan utama bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan segala tindakan, karena hukum dibuat dengan sengaja dan tujuannya untuk menertibkan seluruh warga negara. Kehidupan masyarakat yang semakin modern sekaligus dengan kemajuannya seperti saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peran yang penting dalam bersosial atau berpolitik dan banyak dicari di kehidupan modern yang semakin kompleks dan berkembang seperti saat ini.

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Jika dikaitkan dengan keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kita perlu bernegara hukum yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu mengayomi masyarakat dengan sebaik mungkin, sehingga mereka betah dan nyaman untuk tinggal di negara ini.

Jika Indonesia sampai terjerumus menjadi *serf diven*, maka tak dapat dipungkiri lagi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum yang ada di Indonesia akan bermain dan mengacaukan hukum yang ada di Indonesia.

Sejak tahun 1998, di Indonesia sendiri sudah terjadi pengguliran reformasi, hal ini juga akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan hukum di Indonesia. Masyarakat madani telah membangun lembaga swadaya masyarakat yang amat sangat tertib, sehingga sulit bagi hukum untuk lepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Ketiga lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu antara lain:

- a) Indonesia Corruption Watch (ICW),
- b) Indonesia Police Watch, dan
- c) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).